



SKRIPSI

Judul:

Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Koruptor
Dalam Keadaan Khusus Di Masa Pandemi
(Studi Putusan 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Disusun oleh:

YOHANES ADRIAN WIBISONO
NIM. 205190107

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI BAGI KORUPTOR
DALAM KEADAAN KHUSUS DI MASA PANDEMI (STUDI
PUTUSAN 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tartumanegara

	Oleh :	
Nama	:	Yohanes Adrian Wibisono
NIM	:	205190107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : YOHANES ADRIAN WIBISONO
NIM : 205190107
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Koruptor Dalam Keadaan Khusus Di Masa Pandemi (Studi Putusan 29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)
Title : Juridical Analysis of Imposing Sanctions for Corruptors in Special Circumstances During the Pandemic (Decision Study 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. BENNY DJAJA, Dr., S.H., M.M. M.Hum., MKn.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 13-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

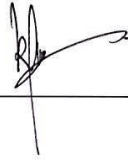
Persetujuan

Nama : YOHANES ADRIAN WIBISONO
NIM : 205190107
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Koruptor Dalam
Keadaan Khusus Di Masa Pandemi (Studi Putusan
29/Pid.Sus Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Abstrak

- (A) Nama / NIM : Yohanes Adrian Wibisono / 205190107
(B) Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Bagi Koruptor Dalam Keadaan Khusus Di Masa Pandemi (Studi Keputusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)
(C) Halaman : i + 80 + 2024
(D) Kata Kunci : Sanksi Pidana, Koruptor, Keadaan Khusus, Pandemi.

Criminal Sanctions, Corruptor, Special Circumstances, Pandemic

- (E) Isi :

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi halnya dirubah oleh Undang Undang No 20 Tahun 2001khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dan (2). Dalam hal terjadinya korupsi pada masa pandemi Covid-19 yang dilaksanakan Juliari P. Batubara selaku Menteri Sosial terhadap waktu tersebut, perbuatannya selaku pejabat negara telah memenuhi unsur keadaan tertentu pada Undang-Undang tersebut dan Pasal 52 KUHP. Namun pada kenyataannya, implementasi penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa tidak tepat karena terdakwa malah mendapatkan keringanan hukuman, yang mana seharusnya terdakwa dikenakan hukuman maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan terhadap keputusan pengadilan negeri No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst didasarkan pada KUHP. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitiannya adalah penjatuhan sanksi oleh majelis hakim terhadap terdakwa tidak mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta implementasi UU Tindak Pidana Korupsi belum efektif dan tidak tegas. Padahal perbuatan terdakwa sangat serius yang dilakukan dalam kondisi bencana nasional.

Corruption is an extraordinary crime. The regulation of the crime of corruption in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, especially in Article 2 paragraph (1) and (2). In the case of corruption during the Covid-19 pandemic committed by Juliari P. Batubara as Minister of Social Affairs at that time, his actions as a state official have fulfilled the elements of certain circumstances in the Law and Article 52 of the Criminal Code. However, in reality, the implementation of the imposition of punishment against the defendant was deemed inappropriate because the defendant received a leniency sentence, which should have resulted in a maximum sentence. This study aims to determine how the considerations in the district court decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst according to the Criminal Code. This research uses normative legal research methods.

The result of the research is that the imposition of sanctions by the panel of judges against the defendant does not reflect the values of justice, certainty and usefulness and the implementation of the Corruption Crime Law is not effective and not firm. Even though the defendant's actions were very serious, which were carried out in the conditions of a national disaster..

- (F) Daftar Acuan : 47 (2001-2024)
(G) Dosen Pembimbing : Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H
(H) Penulis : Yohanes Adrian Wibisono

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan Rahmat- Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Bagi Koruptor Dalam Keadaan Khusus Di Masa Pandemi (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN/Jkt.Pst)”.

Selama proses penulisan proposal, penulis mendapatkan banyak dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan serta dukungan dalam proses pembuatan skripsi, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
 2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dan Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan teliti serta memberikan kritik dan saran kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
 3. Ibu Christine S.T. Kansil. S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
 4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah memberikan manfaat atas ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis;
 5. Segenap Karyawan, Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
 6. Kedua orang tua atas segala doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi; dan
 7. Para sahabat yaitu Mochammad Iqbal Saputra, Muhammad Fachri Pratama, Muhammad Arkan, Dio Adre Wijaya, Verdy Cahyana Putra, dan Muhammad Iqfa Siagian yang telah memberikan dukungan, saran dan motivasi selama masa kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang mampu membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi pihak pihak yang membacanya.

Jakarta, 13 Januari 2025

Penulis

Yohanes Adrian Wibisono

Pernyataan

Nama : YOHANES ADRIAN WIBISONO
NIM : 205190107
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Bagi Koruptor Dalam Keadaan Khusus Di Masa Pandemi (Studi Putusan 29/Pid.Sus*Tpk/2021/PN.Jkt.Pst)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan

A red rectangular meter stamp is placed over the signature. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code 'ALBFBAMX154612185'. The signature is written in black ink over the stamp.

YOHANES ADRIAN WIBISONO
NIM. 205190107

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Orisinalitas.....	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Pendekatan Penelitian	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORITIS	17
A. Teori Tindak Pidana Korupsi	17
B. Teori Delik	19
C. Teori Pidana	21
D. Teori Pertimbangan Hakim.....	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	31
1. Kronologi Kasus.....	31
2. Pertimbangan Pengadilan.....	32
a. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”	34
b. Unsur “Menerima Hadiah”.....	34

c. Unsur “Padahal Diketahui atau Patut diduga.....	34
3. Putusan Pengadilan.....	35
4. Pengaturan Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Vietnam	36
1. Indonesia.....	36
2. Vietnam.....	38
5. Hasil Wawancara dengan Narasumber KPK.....	40
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	42
Bagaimana Logika Hukum Pada Putusan Pengadilan No.....	42
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR LAMPIRAN	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Hasil Turnitin Jurnal
Lampiran 6	: <i>Letter of Acceptance</i> Jurnal Sinta 4
Lampiran 7	: Putusan Pengadilan No. 29/Pid.Sus Tpk/2020/PN.Jkt.Pst